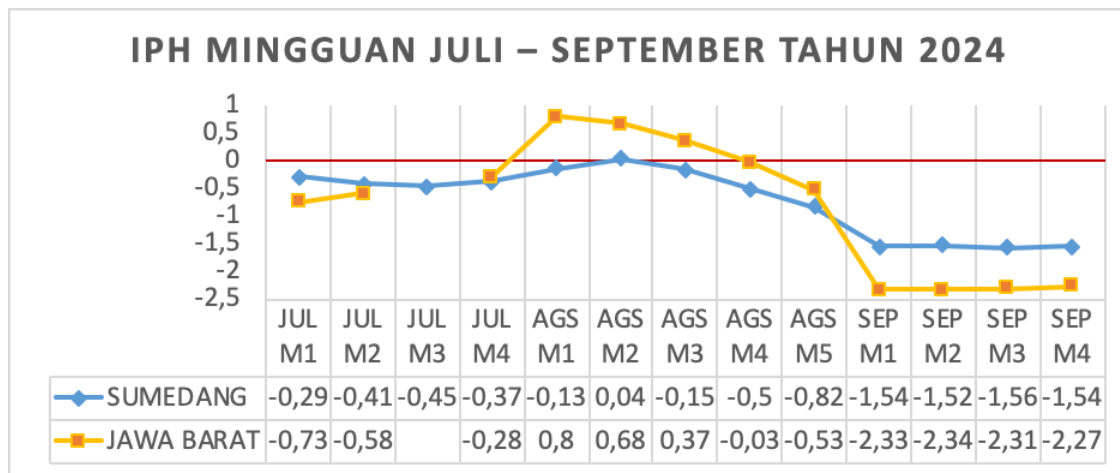


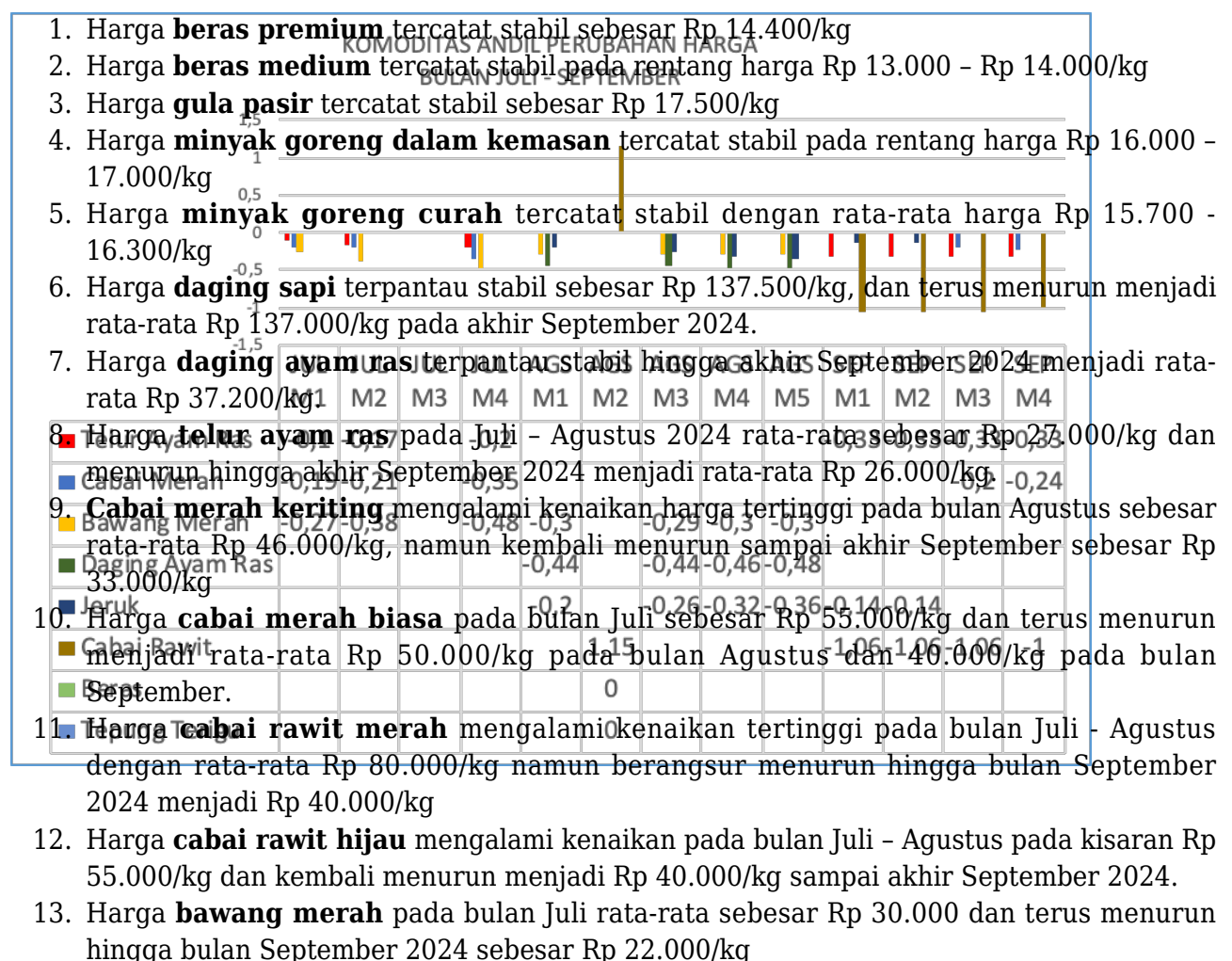
1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi Kabupaten Sumedang pada Triwulan III Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik Indeks Perkembangan Harga sebagai berikut.



Berdasarkan grafik di atas, IPH Kabupaten Sumedang pada M1 Juli hingga M4 September mengalami deflasi, kecuali pada M2 Agustus (0,04%). Deflasi terdalam terjadi pada bulan September akibat penurunan harga komoditas telur ayam ras, cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, jeruk, dan cabai rawit.

Perkembangan harga pangan pangan pokok strategis di 7 Pasar Kabupaten yang dipantau melalui aplikasi SINDANG dapat dijabarkan sebagai berikut.



Harga **bawang putih** terpantau stabil sebesar Rp 39.000/kg

14.

15. Harga **jagung pipilan kering** pada bulan Juli hingga awal September terpantau stabil sebesar Rp 12.000/kg namun naik menjadi Rp 14.000/kg pada akhir September 2024.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sumedang mengalami deflasi selama triwulan III akibat penurunan harga beberapa komoditas pangan.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Sebagaimana telah dijelaskan pada poin 1, bahwa Kabupaten Sumedang mengalami deflasi selama triwulan III. Hal ini disebabkan karena menurunnya harga beberapa komoditas pangan akibat melimpahnya pasokan pasca panen raya.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka mengendalikan laju deflasi di Kabupaten Sumedang, Pemerintah Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah melaksanakan:

- **Mempercepat realisasi belanja Daerah** dimana Kabupaten Sumedang masuk ke dalam 20 besar realisasi belanja tertinggi se-Indonesia sebesar 58,72% dari rata-rata nasional sebesar 44,45%.
- Mencabut **Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 tentang Moratorium Izin Pendirian Minimarket** di Kabupaten Sumedang untuk menjaga daya beli masyarakat.
- **Pemantauan harga dan stok** secara harian baik yang dilakukan oleh UPTD Pasar maupun OPD terkait lainnya yang turun langsung ke setiap pasar dan distributor. Pemantauan harga juga dilakukan melalui aplikasi SINDANG (Sistem Informasi Niaga Kabupaten Sumedang) yang menyediakan data harga dan pasokan secara realtime serta mampu mendeteksi potensi inflasi yang akan terjadi menggunakan metode SMA (*Simple Moving Average*). [Dashboard | sindang \(sumedangkab.go.id\)](https://sumedangkab.go.id/sindang)
- **Operasi Pasar Murah** sebanyak 4 kali dan **Gerakan Pangan Murah** sebanyak 1 kali periode Juli - September 2024 yang dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Perikanan dan Peternakan bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Barat, Perum BULOG Kancab Bandung, FORKOPIMDA Kabupaten Sumedang, dan distributor.
- **Sosialisasi Diversifikasi Konsumsi Pangan yang Bergizi, Beragam, Berimbang dan Aman (B2SA)** yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada Anggota TPPKK Kabupaten Sumedang.
- **Monitoring penyaluran pupuk bersubsidi** sebanyak 3x
- **Peningkatan kapasitas kelompok tani** oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- Gerakan **Program STARBAK** (Satu Desa Satu Hektar Buruh Tani Bangkit), berupa penanaman komoditas jagung hibrida yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani di lahan seluas satu hektar per desa yang disediakan Pemerintah beserta bantuan sarana produksi pertanian lainnya. Program ini berkolaborasi dengan FORKOPIMDA Kabupaten Sumedang dan Mahasiswa KKN Tematik
- Peningkatan produksi pangan yaitu jagung, bawang merah, aneka cabai melalui **pengembangan budidaya, pengadaan benih, serta subsidi saprodi.**
- **Peningkatan produksi hewan ternak** yaitu domba dan ayam kampung.

Gerakan penanaman komoditas hortikultura di pekarangan rumah.

- **Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani** untuk menjaga produksi pertanian
- **Pengawasan dan pemantauan distribusi barang** melalui ATCS serta **pengaturan arus lalu lintas** di lapangan.
- **Pelatihan terkait digitalisasi UMKM** / fasilitasi *e-commerce* kepada 320 pelaku usaha.
- **Penyebarluasan informasi harga pangan** kepada masyarakat melalui penayangan infografis dan video di media sosial.
- **Rapat Koordinasi** Pengendalian Harga dan Pasokan.
- **Rakor TPID oleh Kementerian Dalam Negeri serta Rakor Dwimingguan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kab/Kota se-Jawa Barat**

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagaimana diuraikan pada poin 3 mampu mengendalikan laju inflasi di Daerah. Hal ini terbukti dengan perkembangan Indeks Perkembangan Harga pada Triwulan III yang deflasi namun daya beli masyarakat tetap terjaga. Hal ini ditunjukkan dengan:

1. Angka deflasi tidak terlalu dalam;
2. Komoditas andil deflasi ada di sektor makanan, minuman, dan tembakau sedangkan komponen inti tetap terjaga.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dari berbagai kebijakan yang sudah dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui TPID harus senantiasa melaksanakan:

1. Sidak Pasar Pemantauan Harga dan Pasokan;
2. Stabilisasi harga;
3. Peningkatan Belanja Pemerintah;
4. Menciptakan program stimulus konsumsi (bantuan sosial);
5. Peningkatan akses kredit dan promosi investasi;
6. Kerja Sama Antar Daerah;
7. Digitalisasi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi bisnis dan akses pasar, terutama bagi UKM;
8. Edukasi dan penyuluhan tentang pentingnya konsumsi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi;
9. Ajakan/ sosialisasi belanja di pasar tradisional/ toko masyarakat;
10. *High Level Meeting* dan Rapat Koordinasi.